

ANALISIS PEMANFAATAN DIGITAL CITIZENSHIP SEBAGAI UPAYA PEMBELAJARAN PKN UNTUK GEN Z SETELAH WABAH COVID-19

Dilla Natasya¹, Nur Fadilah Siregar², Yuliskha Putri³, Shella Husna Maharani⁴, Kesia Br Sembiring⁵, Waliyul Maulana Siregar⁶

Universitas Negeri Medan

E-mail: dillanatasya145@gmail.com¹, nurulfadila280799@gmail.com², putriyuliskha@gmail.com³, shellahusnamaharani@gmail.com⁴, kesiasembiring70@gmail.com⁵, waliyulmaulana@gmail.com⁶

INFORMASI ARTIKEL

Submitted : 2024-01-25
Review : 2024-02-28
Accepted : 2024-03-15
Published : 2024-03-31

KATA KUNCI

Covid-19, Digital, Gen Z, Kewarganegaraan

Keywords: *Covid-19, Digital Citizenship, Gen Z*

A B S T R A K

Kewarganegaraan digital sangat penting bagi Gen Z, generasi yang sudah terbiasa dengan teknologi digital sejak dini. Namun, sebagai pengguna internet aktif, Gen Z mempunyai tanggung jawab untuk memahami kewarganegaraan digitalnya. Hal ini mencakup tidak hanya memahami hal-hal seperti etika digital, privasi, dan keamanan siber, namun juga memahami konsekuensi dari perilaku online seperti cyberbullying, penggunaan media sosial, dan konsumsi konten yang tidak pantas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Pengumpulan data akan dilakukan melalui dokumen-dokumen yang relevan seperti jurnal, laporan konferensi, makalah ilmiah, dll mengenai topik penelitian dan akan dijadikan data penelitian. Hasil dari pengenalan kewarganegaraan digital kepada Gen Z dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan penting dalam membantu mereka menjadi pengguna Internet yang bertanggung jawab dan beretika. Hal ini juga akan membantu siswa Gen Z mengembangkan kemampuan mereka dalam memilih konten digital yang sesuai dan meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya keamanan siber. Dalam lingkungan digital yang kompleks dan berubah dengan cepat, memiliki kewarganegaraan digital adalah elemen kunci dalam membantu siswa Gen Z menjadi pengguna internet yang bertanggung jawab dan beretika. Saat ini, miliaran orang di seluruh dunia berkomunikasi satu sama lain menggunakan berbagai sarana teknologi. Berkat koneksi ini, kita kini hidup di dunia digital di mana orang dapat belajar, bekerja, bermain, dan bersosialisasi dengan mudah. Demikian pula, pendidik dari semua tingkat keterampilan mungkin tidak memahami cara menggunakan teknologi secara efektif. Oleh karena itu, baik siswa maupun guru perlu menjadi anggota warga digital. Temuan menunjukkan bahwa dalam hal elemen kewarganegaraan digital, guru jauh lebih tinggi

dibandingkan siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa berisiko berada di lingkungan digital seiring dengan pandemi Covid-19. Aspek penting ini mengarahkan sekolah untuk memberikan inisiatif dan mengintegrasikan kewarganegaraan digital ke dalam kurikulum untuk menghasilkan warga digital yang bertanggung jawab.

ABSTRACT

Digital citizenship is very important for Gen Z, a generation that has been accustomed to digital technology from an early age. However, as active internet users, Gen Z has a responsibility to understand their digital citizenship. This includes not only understanding things like digital ethics, privacy, and cybersecurity, but also understanding the consequences of online behavior like cyberbullying, social media use, and consumption of inappropriate content. This research uses a qualitative approach using library research methods. Data collection will be carried out through relevant documents such as journals, conference reports, scientific papers, etc. regarding research topics and will be used as research data. The outcomes of introducing digital citizenship to Gen Z in civics education courses are important in helping them become responsible and ethical Internet users. This will also help Gen Z students develop their abilities in selecting appropriate digital content and increase their awareness of the importance of cybersecurity. In a complex and rapidly changing digital environment, having digital citizenship is a key element in helping Gen Z students become responsible and ethical internet users. Nowadays, billions of people across the world communicate with one another using a variety of technological means. As a result of this connection, we now live in a digital world where people can learn, work, play, and socialize with ease. Likewise, educators of all skills levels may not understand how to use technology effectively. Hence, both students and teachers need to become a member of a digital citizenry. Findings revealed that in terms of the elements of digital citizenship, teachers are significantly higher than students. The results indicate that students are at risk in this digital environment along with the covid-19 pandemic. This critical aspect addresses the schools to provide initiative and integrate digital citizenship in the curriculum in order to provide a responsible digital citizen.

PENDAHULUAN

Gen Z merupakan generasi yang tumbuh dan dibesarkan pada era digital. Mereka dibesarkan dengan akses mudah terhadap teknologi digital seperti internet, smartphone, dan media sosial. Karena hal ini, Gen Z mahasiswa memiliki cara pandang dan cara hidup yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka lebih cenderung mengandalkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam proses belajar dan akademik.

Meskipun demikian, digitalisasi memberikan banyak manfaat dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, ada juga beberapa risiko dan bahaya yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal penggunaan internet dan media sosial. Hal ini mengarah pada pentingnya konsep Digital citizenship. Masih ada beberapa siswa yang tidak menyadari betapa pentingnya memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep Digital citizenship. Banyak dari mereka hanya melihat teknologi digital sebagai sarana untuk mengakses informasi atau untuk bersosialisasi, tanpa memperhatikan risiko dan bahaya yang mungkin terkait dengan penggunaan teknologi digital. Selain itu pula terlibat dalam perilaku cyberbullying, seperti menghina atau menyerang orang lain secara online. Hal ini dapat merugikan kesehatan mental dan emosional korban, serta dapat mengakibatkan masalah hukum. Maka, mahasiswa perlu memahami konsep Digital citizenship dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks akademik.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi digital yang mereka lakukan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, mahasiswa setidaknya harus mempunyai tiga kompetensi. Seperti yang dijelaskan oleh Margaret Stimmann Branson (1999: 8) bahwa terdapat tiga kompetensi kewarganegaraan yaitu warga negara harus mempunyai pengetahuan yang cukup (*civic knowledge*), kemudian keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) yang baik. Selain itu, kompetensi kewarganegaraan perlu juga dilengkapi dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Sehingga demokrasi yang berkualitas dapat dicapai dan sekaligus memberikan manfaat terhadap kesejahteraan bersama (*civic virtue*). Untuk meminimalkan efek buruk yang timbul akibat perkembangan teknologi digital, diperlukan konsep kewarganegaraan digital yang dapat beradaptasi dengan cepat dengan kemajuan teknologi tersebut. Konsep kewarganegaraan digital ini muncul karena semakin meluasnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Digital citizenship adalah konsep yang mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab dan efektif. Konsep ini mencakup berbagai aspek seperti privasi online, etika digital, cyber bullying, hak cipta, dan keamanan online. Mike Ribble (2007) memperkenalkan sebuah konsep baru dalam bukunya *Digital citizenship in School*, yang menggarisbawahi pentingnya bagi pendidik dan siswa sebagai pengguna teknologi informasi untuk memahami berbagai aspek teknologi digital. Hal ini menjadi suatu keharusan di era digital saat ini agar mereka dapat menggunakan teknologi baru dengan benar dan bertanggung jawab. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi milenial sebagai warga negara yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan demokrasi yang berkeadaban. Oleh karena itu, penting untuk memperkenalkan konsep Kewarganegaraan Digital (*Digital citizenship*) kepada siswa agar mereka siap dan mampu berperan serta secara baik dan bertanggung jawab di dalam dunia digital.

Selain itu, persyaratan untuk berkomunikasi dan bekerja sama secara aman secara online telah melahirkan gagasan tentang kewarganegaraan digital (Ribble et al., 2004; Ribble, 2008; Shelley, 2004; Ozturk, 2021). Secara historis, penting. Nilai-nilai kewarganegaraan antara lain bersikap sopan dan santun, bertanggung jawab, dan memberikan kontribusi positif masyarakat (Impero Software & Digital Citizenship Institute, 2016). Konsep kewarganegaraan digital tidak demikian berbeda dengan kewarganegaraan konvensional (Somyürek, 2019). Seperti halnya semua anak pada seluruh manusia Sejarahnya, generasi muda saat ini, yang dijuluki sebagai digital native, memerlukan pengawasan untuk belajar bagaimana menerapkan cita-cita sipil di lingkungan digital (Impero Software & Digital Citizenship Institute, 2016; Fingal, 2020).

Tujuan pendidikan kewarganegaraan digital dalam sistem pendidikan adalah untuk mendidik siswa dengan pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan teknologi secara aman dan tepat. Beberapa keterampilan penting yang dimiliki siswa harus berkembang agar dapat menavigasi dunia digital secara efektif termasuk kemampuan menemukan lokasi yang andal informasi online, mengidentifikasi konten mencurigakan, memahami kebijakan privasi yang berlaku terhadap informasi dikumpulkan secara online, dan memanfaatkan apa yang ditawarkan teknologi dengan bekerja sama secara bertanggung jawab lainnya di seluruh dunia.

Relevansi kewarganegaraan digital telah lama diakui sebagai kebutuhan K-12 (Herold 2016) dan, pada gilirannya, kasus tertentu, pendidikan pasca sekolah menengah (Herold 2016). (Almekinder dkk. 2017). Banyak sekali yang besar bisnis teknologi, seperti Google dan Microsoft, juga menyediakan kurikulum online untuk membantu guru dan orang tua dalam mengajar anak-anak mereka tentang kewarganegaraan digital. Selain itu, Masyarakat Internasional untuk teknologi dalam pendidikan memasukkan gagasan tentang kewarganegaraan digital ke dalam pedomannya bagi siswa, guru, dan administrator seputar penggunaan informasi dan teknologi yang tepat dan etis (ISTE 2017).

Selain itu, subjek penelitian ilmiah menjadi relevan sejak adanya masyarakat informasi digantikan oleh masyarakat digital, dan teknologi digital telah menjadi komponen penting kehidupan sosial manusia (Bykovet al., 2017; Fediy, 2019; Ruenphogphon et al., 2021). Hui dan Campbell (2018) mencatat bahwa nilai kewarganegaraan digital telah diakui secara luas dan dimasukkan ke dalam standar kurikulum sekolah. Namun, relatif sedikit studi empiris yang dilakukan untuk menilai keberhasilan upaya baru ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yang merupakan bagian dari metode penelitian kualitatif. Metode ini melibatkan pengumpulan sumber daya pustaka, seperti jurnal, prosiding, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian, untuk digunakan sebagai data penelitian. Oleh karena itu, metode studi kepustakaan (library research) digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan tinjauan yang komprehensif mengenai konsep kewarganegaraan digital, konsep generasi, karakteristik dan peran mereka dalam melakukan partisipasi dalam konteks demokrasi partisipatori. Tinjauan literatur terkait dibahas secara mendalam dengan pendekatan kualitatif naturalistik. Data yang dikumpulkan akan dianalisis, dicatat, dan diolah sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewarganegaraan digital adalah konsep yang berkaitan dengan hak dan kewajiban individu sebagai warga negara dalam ruang digital. Digital citizenship can be defined as a norm of behavior related to the use of technology, or it can be interpreted that Digital citizenship is the ability to participate in online societies (Mossberger, 2007:25). Konsep ini meliputi berbagai aspek, termasuk literasi digital, privasi, keamanan, partisipasi, tanggung jawab, dan hak-hak digital.

Kewarganegaraan digital juga mencakup kemampuan untuk menggunakan teknologi dengan bijaksana, dan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam dunia digital. Konsep ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, yang mempengaruhi cara partisipasi warga negara dalam menggunakan media digital. Di samping itu, konsep generasi Z sebagai generasi yang dominan dalam konteks partisipasi juga mendapat perhatian karena memiliki karakteristik khas. Jadi dapat disimpulkan bahwa Digital citizenship merujuk pada pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi secara benar dan efektif di era digital, termasuk kemampuan untuk mengelola risiko dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh dunia digital dengan bijak.

Dalam konteks ini, Digital citizenship tidak hanya tentang memahami cara menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita bertanggung jawab dalam penggunaannya, memahami pentingnya privasi dan keamanan online, serta memahami dampak sosial dan etis dari penggunaan teknologi. Meskipun kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan, namun sayangnya banyak orang yang menyalahgunakannya untuk tujuan yang tidak etis atau tidak pantas. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya informasi yang tersedia dan mudah diakses melalui internet, terutama melalui media sosial. Banyak dari informasi yang tersebar di media sosial tersebut berisi ujaran kebencian, berita palsu, atau bahkan fitnah, yang bisa menimbulkan kerugian dan bahaya bagi masyarakat.

Kewarganegaraan yang bertanggung jawab saat ini menjadi 'subyek yang diperebutkan dengan hangat' di kalangan pendidikan di Amerika Serikat, telah menduduki peringkat ketiga di Tren Teknologi untuk (2017). Undang-Undang Perlindungan Internet Anak (CIPA), yang disahkan pada tahun 2000, merupakan inti perdebatan (Noakes, 2017).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa banyak anak kecil yang melakukan perilaku yang tidak diinginkan secara sosial online dari siswa muda lainnya serta orang dewasa yang canggung secara sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keamanan dan privasi identitas online dan informasi pribadi siswa.

Di luar dari dalam lingkungan kelas, penggunaan teknologi secara pribadi oleh siswa memiliki kemampuan untuk membentuk masa depan mereka keselamatan publik, privasi internet, dan perilaku yang dapat diterima secara sosial.

Di Filipina peningkatan kesadaran masyarakat mengenai privasi dan keamanan online baru saja dimulai di Filipina. Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi (DICT) sudah mulai membangun komputer pusat-pusat yang memiliki program dan kegiatan literasi TIK di barangay tertentu dengan bantuan pemerintah daerah entitas (DICT, n.d.). Departemen Pendidikan (DepEd) sekali lagi bekerja sama untuk mengembangkan kewarganegaraan digital yang dapat dipercaya di kalangan guru dan siswa.

Sejak lama, para pendidik di Filipina telah mengetahui bahwa sekolah-sekolah yang didanai negara ingin mendidik siswanya bagaimana memanfaatkan peralatan

mekanis sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab moral ketika memanfaatkan perkembangan teknologi. Kemajuan teknis juga semakin cepat, sehingga hal ini perlu dilakukan untuk mengambil tindakan yang sesuai atau meningkatkan metode membina individu yang teliti.

Fakta bahwa siswa dan instruktur harus memanfaatkan alat digital selama epidemi COVID-19 merupakan suatu keharusan penekanan yang lebih besar pada masalah pengajaran kewarganegaraan digital dan komponen-komponennya.

Sembilan elemen kewarganegaraan digital adalah akses digital, perdagangan digital, digital komunikasi, literasi digital, etiket digital, hukum digital, hak dan tanggung jawab digital, digital kesehatan dan kesejahteraan, serta keamanan (dan keselamatan) digital, yang masing-masing didefinisikan di bawah ini

1. Digital Law

Dengan tren baru, peraturan dan batasan baru diberlakukan. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan, regulasi dipercepat untuk mengimbangnya, sehingga peraturan dan regulasi selalu berubah. Guru dan siswa sama-sama menginginkannya untuk mendapat informasi dan terkini tentang apa yang sah dan pantas. Hukum digital berkaitan dengan penentuan apa yang termasuk perilaku tidak pantas dan apa yang termasuk pelanggaran hukum yang sebenarnya, dan mempunyai pengaruh yang kuat kemiripan dengan masalah kekayaan intelektual dan hak cipta. Kode ini akan memastikan bahwa setiap orang yang ingin memanfaatkan konten yang disebarluaskan secara digital dapat melakukannya tanpa rasa takut dirugikan dengan cara apa pun (seperti mengunduh, mengubah, atau menggunakannya kembali). Sebagai bagian dari pendidikan hukum digital mereka, siswa belajar bagaimana melakukan riset Internet dan mengutip sumber dengan benar untuk berbagai media, termasuk gambar, artikel, dan video.

2. Digital Security

Kita mengajarkan anak-anak untuk melihat ke dua arah sebelum menyeberang jalan, untuk menghindari percakapan orang asing, dan mengetahui siapa yang harus dihubungi saat krisis. Langkah-langkah keamanan serupa sangat penting di masa depan jaringan, termasuk cara membuat kata sandi yang kuat, mengelola infeksi, dan memutuskan keamanan situs. Selain itu, kelemahan keamanan biasanya terjadi bukan karena kelemahan pada peralatan, melainkan sebagai akibat tentang bagaimana manusia menggunakannya. Melindungi peralatan seseorang adalah tugas pribadi yang juga berkontribusi terhadap perlindungan masyarakat. Keamanan digital mengacu pada metode, aturan, dan proses yang dilakukan individu mempekerjakan mereka untuk menjamin bahwa penggunaan Internet mereka tidak berdampak buruk pada bagian lain kehidupan mereka.

Aspek ini menekankan langkah-langkah yang harus diambil individu untuk menghindari informasi pribadi mereka disusupi atau dicuri sebagai akibat dari interaksi internet. Individu yang mempraktikkan keamanan digital yang baik

3. Digital Etiquette

Sama pentingnya bagi anak-anak untuk memahami bagaimana berperilaku yang pantas dalam lingkungan di kelas, di taman bermain, dan selama hari sekolah, mereka juga harus mengeksplorasi bagaimana menjadi luar biasa on line. Lebih dari sekedar menetapkan pedoman untuk perilaku yang dapat diterima, anak-anak harus diajari nilai-nilai menghormati rekan-rekan online mereka dan bagaimana berperilaku dengan benar. Warga digital yang berakal sehat berkomunikasi dan terlibat dengan sopan santun sejauh yang mereka nyatakan alasan mereka ketika tidak setuju dengan apa pun secara online, hindari pertengkaran online ketika mereka menemukannya, dan mematuhi

batasan ponsel. Saat mereka online, penghuni digital yang canggih memamerkannya sopan santun yang pantas. Mereka mematuhi aturan, konvensi, dan konvensi yang berulang di dunia digital harapan, yang sebagian besar tidak tertulis

4. Digital Literacy

Menjadi warga negara yang terdidik adalah komponen penting dalam menjadi warga negara yang bertanggung jawab, bukannya menjadi warga negara yang bertanggung jawab menyebutkan bahwa semakin banyak anak yang melek teknologi, semakin siap mereka untuk bekerja atau pendidikan pasca sekolah menengah.

Kemampuan melakukan riset online, mengidentifikasi sumber terpercaya, dan memanfaatkan frasa program perangkat lunak pemrosesan adalah semua kemampuan penting. Selain itu, salah satu komponen terpenting dari teknologi adalah pemahaman tentang bagaimana ilmu itu bekerja agar dapat dimanfaatkan secara maksimal cara yang indah mungkin.

Literasi digital disebut juga dengan literasi baru, literasi media, atau literasi informasi pada dasarnya pemahaman dasar individu tentang fungsi komputer dan penggunaan teknologi melalui kemampuan untuk menerapkan keterampilan digital pada situasi tertentu untuk berpartisipasi dalam dunia online (Curran & Ribble, 2017).

Guru yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan literasi digital yang berkualitas keterampilan seperti menavigasi dan mengevaluasi platform online dan memahami dasar-dasarnya penggunaan komputer dan perangkat seperti email, mesin pencari, pengolah kata, dan persiapan produksi siswa untuk menjadi pekerja abad ke-21 yang lebih efektif.

5. Digital Communication

Dengan email, pesan teks, dan obrolan video, komunikasi menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Dengan mengklik mouse, statistik sensitif dapat dikirimkan dengan cara yang berbahaya. Kampus siswa harus diperingatkan tentang apa yang pantas untuk dikomunikasikan melalui media digital yang harus dihindari

situasi yang memalukan, mahal, dan berbahaya. Komunikasi digital mengacu pada proses yang dilalui di mana manusia terhubung melalui sarana digital dan aliran serta pertukaran informasi yang diperoleh melalui teknologi.

6. Digital Access

Akses digital mengacu pada konsep memiliki akses yang adil terhadap sumber daya teknologi yang memungkinkan setiap orang penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Akses digital dapat dimanfaatkan di dalam kelas untuk membantu siswa dengan gangguan dalam mengakses informasi kurikulum tradisional. Analisis konsep Choi (2016) menemukan bahwa beberapa penelitian mengidentifikasi kurangnya akses terhadap sumber daya digital, yang sering disebut dengan digital kesenjangan, sebagai penghambat pengembangan kemampuan literasi media dan informasi sebagai warga negara.

Namun, implementasi Digital citizenship pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan juga perlu disertai dengan penggunaan metode pengajaran yang tepat. Materi yang disampaikan harus disesuaikan dengan konteks yang relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, penggunaan teknologi dalam proses pengajaran juga harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif pada siswa. Implementasi Digital citizenship pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

- 1. Menyediakan Materi Khusus Tentang Digital Citizenship.** Dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, materi tentang Digital citizenship dapat

diintegrasikan sebagai salah satu topik yang penting untuk dipelajari. Materi tersebut dapat mencakup berbagai hal seperti penggunaan teknologi yang etis, keamanan dan privasi online, serta hak cipta.

2. **Menggunakan Metode Pembelajaran Yang Aktif Dan Interaktif.** Pembelajaran Digital citizenship dapat dilakukan dengan metode pembelajaran yang aktif dan interaktif, seperti diskusi kelompok, simulasi, dan proyek. Metode pembelajaran yang aktif dan interaktif dapat membantu mahasiswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan dapat memperkuat pemahaman mereka tentang Digital citizenship.
3. **Menggunakan Contoh Nyata Dan Kasus Studi.** Penggunaan contoh nyata dan kasus studi dapat membantu siswa memahami bagaimana Digital citizenship dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyata dan kasus studi juga dapat membantu siswa memahami dampak dari penggunaan teknologi yang tidak etis atau bertanggung jawab.
4. **Menggunakan Teknologi Dalam Pembelajaran.** Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu mahasiswa memahami lebih dalam tentang penggunaan teknologi yang etis dan bertanggung jawab. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memberikan pengalaman langsung tentang Digital citizenship, seperti dengan melakukan simulasi dan permainan interaktif.
5. **Mengadakan Kegiatan Atau Program Yang Mendukung Digital Citizenship.** Kegiatan atau program seperti pelatihan keterampilan digital, kampanye keamanan online, atau peningkatan kesadaran tentang cyberbullying dan kejahatan cyber lainnya dapat membantu memperkuat pemahaman mahasiswa tentang Digital citizenship

Implementasi Digital citizenship pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk membantu membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan terampil dalam menggunakan teknologi digital. Dalam proses implementasinya, diperlukan dukungan dan kerjasama antara pihak-pihak terkait seperti pengajar, mahasiswa, dan institusi pendidikan. Secara keseluruhan, implementasi Digital citizenship pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sangat penting membantu membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan terampil menggunakan teknologi.

SIMPULAN

Digital Citizenship merupakan konsep yang dapat digunakan dalam memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi digital. Digital Citizenship memiliki keterkaitan dengan literasi digital, sehingga para generasi Gen Z dapat memilah informasi yang benar dan bertanggungjawab. Pada perkembangan zaman sekarang, kemampuan memilih informasi yang benar dan valid itu penting agar tidak menimbulkan misinformasi atau konflik didalam kehidupan bermasyarakat.

Gen Z merupakan warga negara baru yang sudah dewasa dan aktif menggunakan teknologi digital. Kewarganegaraan mempunyai tanggung jawab untuk melatih mereka dalam praktekpartisipasi yang menciptakan demokrasi yang beradab serta menjadi penting bagi Gen Z untuk membantu kemudian memahami dan mengatasi tantangan serta kesempatan yang muncul dalam konteks digital. Oleh karena itu, penting bagi Gen Z untuk diperkenalkan dengan konsep kewarganegaraan digital agar mereka siap berpartisipasi secara bertanggung jawab dan efektif.

Beberapa bekal pengetahuan dan kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh

Gen Z dalam menyiapkan perannya sebagai warga negara digital yang baik menyangkut berbagai aspek yaitu tentang digital access, literacy, communication, commerce, law, etiquette, rights & responsibilities, health & wellness, dan security. Lebih jauh konsep yang harus benar-benar dikuasai adalah empati, memahami cara kerja internet, memahami data pengguna internet, literasi komputer/internet, memahami kesenjangan dalam penguasaan teknologi digital, mempraktikkan kenyamanan dan keharmonisan dalam partisipasi di dunia digital, serta mampu menggunakan media ini dengan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- De Porter, Bobbi dan Hernacki, Mike. 1992. *Quantum Learning. Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*. Terjemahan oleh Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Penerbit Kaifa.
- James W, Elston D, T. J. et al. (20 C.E.). 濟無No Title No Title No Title. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 175–192.
- Juhaidi, A., Fitria, A., Hidayati, N., Syaifuddin, Ridhahani, Aseri, A. F., Umar, M., Aseri, M., & Riza, M. (2023). Digital Citizenship of Generation Z in Indonesia: Does Islamic Higher Education Matter? *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 23(13), 165–181.
- Roza, P. (2020). Digital citizenship: menyiapkan generasi milenial menjadi warga negara demokratis di abad digital. *Jurnal Socioteknologi*, 19(2), 190–202.
- Setyawan, R. D., Hijran, M., & Rozi, R. (2023). Implementasi Digital citizenship untuk Kalangan Gen Z Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 11(2), 270–279.
- Sujimat, D. Agus. 2000. Penulisan karya ilmiah. Makalah disampaikan pada pelatihan penelitian bagi guru SLTP Negeri di Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Oktober 2000 (Tidak diterbitkan). MKKS SLTP Negeri Kabupaten Sidoarjo
- Suparno. 2000. Langkah-langkah Penulisan Artikel Ilmiah dalam Saubah, Ali dan Waseso, M.G. 2000. *Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah*. Malang: UM Press.
- Triastuti, R. (2019). Teachers and technology: The perspective of digital citizenship. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(1), 22–28.
- Wahab, Abdul dan Lestari, Lies Amin. 1999. *Menulis Karya Ilmiah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Winardi, Gunawan. 2002. *Panduan Mempersiapkan Tulisan Ilmiah*. Bandung: Akatiga.